

PENINGKATAN KAPASITAS UKM MEBEL & KERAJINAN BALI DALAM IMPLEMENTASI & PEMENUHAN PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT SVLK

PROGRAM KERJASAMA ASMINDO DENGAN FAO FLEGT PROGRAM

AMARIS HOTEL, DENPASAR-BALI, 5 APRIL 2019

Pelatihan SVLK dalam rangka peningkatan kapasitas UKM mebel dan kerajinan di Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 5 April 2019, di Hotel Amaris Jl. Teuku Umar No. 139, Denpasar Bali. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Dewa Mantra, SH, MH. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Dewan Pengurus Pusat Asmindo, yaitu: (1) Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang R&D, yang juga merupakan Ketua Asmindo Komda Bali, Pidekso; (2) Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi, Robert Wijaya; dan (3) Ketua Bidang Organisasi Asmindo, Endro Wardoyo. Selain itu sebagai narasumber adalah (1) Kepala Bidang Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang diwakili oleh Dewa Satrya dan; (2) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, yang diwakili oleh Ibu Lestari; dan sebagai moderator adalah Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advokasi, Robert Wijaya. Acara diikuti oleh 18 peserta, yang terdiri atas pengrajin mebel dan kerajinan di wilayah Provinsi Bali.



Dalam sambutannya, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Dewa Mantra, SH, MH, menyampaikan bahwa Provinsi Bali merupakan salah satu sentra usaha kerajinan kayu di Indonesia yang sudah dikenal dimanca negara. Para pelaku usaha kerajinan kayu di Bali mayoritas

merupakan UKM. Oleh karena itu pemerintah provinsi Bali sangat mendukung upaya-upaya dalam peningkatan kapasitas UKM, khususnya untuk para pelaku usaha kerajinan kayu di Provinsi Bali. Disampaikan juga bahwa diharapkan acara ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan para pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam perdagangan kayu legal. Dipahami bahwa tuntutan pasar internasional terhadap produk – produk ramah lingkungan terus meningkat dari tahun ke tahun, termasuk produk mebel dan kerajinan kayu. Oleh karena itu, untuk dapat memasuki pasar internasional maka para pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di Provinsi Bali harus mampu memenuhi tuntutan pasar internasional, khususnya terkait dengan penggunaan bahan baku kayu, yang jelas asal usul dan legalitasnya. Untuk itu, adanya program kerjasama Asmindo dan FAO dalam pendampingan SVLK di Provinsi Bali merupakan kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha. Selanjutnya Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asmindo dan FAO, yang telah memilih Provinsi Bali sebagai salah satu target wilayah dari program ini. DPMPTSP Provinsi Bali akan turut berusaha untuk mensukseskan program ini, dan siap membantu para pelaku usaha mebel dan kerajinan di Bali dalam mengurus perizinan usahanya.



Selanjutnya Ketua Bidang Organisasi Dewan Pengurus Pusat Asmindo, Endro Wardoyo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian program kerjasama Asmindo dengan FAO di tiga kota untuk memperkuat pendampingan UKM-UKM di Indonesia khususnya di bidang mebel dan kerajinan kayu. Data Dinas Perdagangan Provinsi Bali, menunjukkan bahwa ekspor kerajinan kayu di Bali menempati urutan ketiga, sedangkan ekspor mebel kayu menempati urutan ke enam dari total ekspor Provinsi Bali, dengan tujuan pasar utama adalah Amerika. Hal ini menunjukkan potensi ekspor mebel dan kerajinan kayu di Bali sangat tinggi. Namun para pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di Bali masih banyak yang belum memiliki sertifikat Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu (SVLK), karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi, diantaranya adalah masalah biaya, perijinan yang belum lengkap dan lain-lain. Melalui program ini diharap para pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di Bali dapat lebih mudah dalam mengakses SVLK, sehingga dapat meningkatkan nilai eksportnya. Disampaikan pula bahwa Asmindo, memiliki beberapa program dalam rangka meningkatkan kapasitas UKM agar dapat meningkatkan usahanya. Program-program tersebut diantaranya adalah memfasilitasi para UKM untuk ikut serta dalam pameran mebel dan kerajinan bertaraf internasional, seperti yang sudah dilakukan pada tanggal 13 - 16 Maret lalu, yaitu pameran JIFFINA yang dilaksanakan di Yogyakarta. Selain itu, dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas serta standarisasi SDM sektor industri mebel dan kerajinan, maka pada tahun 2018, Asmindo bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian R.I., telah melaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi bagi para pekerja sektor mebel dan kerajinan. Program ini sangat bermanfaat dan membantu para pelaku usaha mebel dan kerajinan dalam mendapatkan SDM handal dan bersertifikat. Untuk terus meningkatkan kualitas dan standarisasi SDM maka pada tahun 2019 ini program serupa akan terus dilanjutkan, dengan materi diklat meliputi : *finishing*, konstruksi kayu (pembahanan) dan *machinery*, dengan target \pm 2.000 orang tenaga kerja. Adapun sebaran lokasi diklat meliputi 13 wilayah, dengan komposisi sebagai berikut:

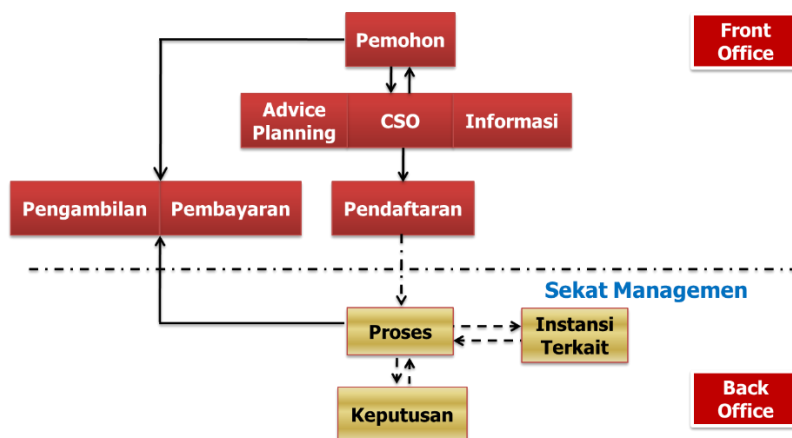
1. Padang	: 2 angkatan	8. Jogja	: 6 angkatan
2. Palangkaraya	: 2 angkatan	9. Solo	: 2 angkatan
3. Manado	: 2 angkatan	10. Klaten	: 4 angkatan
4. Makasar	: 6 angkatan	11. Blora	: 4 angkatan
5. Bali	: 2 angkatan	12. Jepara	: 4 angkatan
6. Pasuruan	: 5 angkatan	<u>13. Bandung</u>	<u>: 2 angkatan</u>
7. Jombang	: 6 angkatan	Total	: 47 Angkatan

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang R&D, yang juga merupakan Ketua Asmindo Komda Bali, Pidekso, menyampaikan bahwa para pelaku Usaha mebel dan kerajinan khususnya di Provinsi Bali, masih sangat membutuhkan dukungan pemerintah dalam mengakses pasar melalui kegiatan promosi. Dukungan dapat diberikan dengan menyelenggarakan kegiatan pameran mebel dan kerajinan bertaraf internasional di Bali. Hal ini mengingat Bali memiliki posisi yang sangat strategis, yang juga merupakan daerah tujuan wisata. Untuk itu, lanjutnya, ke depan Bali perlu memikirkan UKM center untuk menjadi tempat berkumpulnya para pengrajin, sehingga bisa menjadi one stop shopping bagi wisatawan. "Dengan adanya UKM Center, buyer tak perlu lagi memakai pihak ketiga, tapi langsung bertransaksi dengan pengrajin. Sedangkan terkait SVLK, diakui bahwa para pelaku UKM mebel dan kerajinan di Bali masih banyak yang enggan dalam mengurus SVLK, karena terkendala masalah biaya.



Acara selanjutnya adalah pemaparan dari para narasumber yang dipandu oleh moderator. Sebagai narasumber pertama adalah Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, yang diwakili oleh Dewa Satrya, dan menyampaikan paparan mengenai kebijakan umum ekspor dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Dalam paparannya disampaikan bahwa kebijakan umum ekspor disusun dalam rangka peningkatan daya saing, menjamin kepastian usaha dan kesinambungan bahan baku industri di dalam negeri, mendukung kelestarian lingkungan/Sumber Daya Alam dan aspek kesehatan, keamanan, keselamatan lingkungan dan moral bangsa (K3LM), serta perjanjian Internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor, yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, yang dapat dilakukan oleh : orang perorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Disampaikan pula bahwa 10 komoditas utama yang diekspor Bali pada tahun 2018 adalah ikan tuna, tekstil dan produk tekstil, kerajinan kayu, ikan kerapu, ikan kakap, mebel, kerajinan perak, plastic, kerajinan logam dan buah manggis. Mebel dan kerajinan kayu memberikan kontribusi sekitar USD 141 juta. Sementara itu pertumbuhan UKM Provinsi Bali pada tahun 2017 tercatat jumlah UKM sebanyak 14.992 unit, yang melibatkan tenaga kerja sebanyak 104 ribu orang, dengan nilai investais sebesar Rp. 4,1 M dan nilai produksi sebesar Rp. 9,2 milyar.

Narasumber kedua adalah Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Lestari, yang menyampaikan paparan berjudul “Peluang Kemitraan Usaha Besar dengan UKM/IKM di Provinsi Bali dalam Pendampingan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Disampaikan mengenai gambaran umum Provinsi Bali yang memiliki luas : 5.636,66 km², dengan penduduk tahun 2017 sebanyak 4.246.500 jiwa, yang terdiri atas 9 kabupaten/kota, 57 kecamatan, dan 715 desa/kelurahan. Disampaikan pula bahwa Bali merupakan pulau kecil yang memiliki kelengkapan ciri geografis seperti gunung, lembah, pantai, danau dan sawah yang memancarkan keindahan & keagungan pesona alam dengan kreatifitas masyarakatnya yang kental dengan aktifitas seni & budaya. Telah menjadikan Bali sebagai daerah tujuan wisata yang sangat terkenal di dunia serta menjadikan Bali sebagai tujuan investasi yang sangat menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan investasi yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Potensi ekonomi Bali, dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: (1) pertanian (primer); (2) pabrikan, perdagangan & jasa (sekunder); serta (3) pariwisata (tertier). Layanan perizinan untuk membuka usaha di Provinsi Bali dapat diajukan kepada PTSP Provinsi Bali atau PTSP kabupaten/kota se-Bali. Adapun jenis perizinan yang ditangani (sesuai Peraturan gubernur No. 33 tahun 2018, untuk sektor kehutanan adalah: (1) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 m³ (Enam Ribuh Meter Kubik); (2) Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT – KB); dan (3) Izin Usaha Industri Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT – KO). Sedangkan untuk sektor perdagangan dan perindustrian adalah: (1) Angka Pengenal Importir (API); (2) Izin Usaha Industri (IUI) Besar; (3) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP - MB) Distributor; (4) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Toko Bebas Bea (SIUP – MB – TBB); (5) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT – B2); dan (6) Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP – B2) untuk Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT – B2). Mekanisme pelayanan pengurusan perijinan pada PTSP seperti digambar pada skema dibawah ini;





Pada sesi akhir acara Wakil Ketua Umum Asmindo Bidang Kajian Regulasi, Sertifikasi dan Advikasi, Robert R. Wijaya dan Direktur Eksekutif Asmindo, sekaligus sebagai *Project Manager* program kerjasama Asmindo dengan FAO, Indrawan, menyampaikan overview mengenai prinsip, kriteria, indikator dan verifiser SVLK untuk jenis ijin usaha yang termasuk dalam kategori pemegang Tanda Daftar Industri (TDI), yaitu ijin usaha dengan nilai investasi dibawah Rp. 200 juta (diluar tanah dan bangunan). Dimana kategori usaha ini yang paling sesuai untuk para pelaku usaha mebel dan kerajinan kayu di wilayah Bali. Selanjutnya, dibentuk kelompok SVLK UKM Bali, yang berminat mengikuti program pendampingan SVLK secara berkelompok, yang terdiri atas:

- 1) CV. Steven Furniture
- 2) PT. Tarumas Lalita
- 3) CV. Furniture Canggu
- 4) CV. Tri Utami
- 5) PT. Wood and Soul
- 6) CV. W.K. Concept
- 7) CV. Aditya Furniture

Denpasar, 5 April 2019

ASOSIASI INDUSTRI PERMEBELAN &
KERAJINAN INDONESIA (ASMINDO)

Notulen